

LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN | 2022 PENGADILAN NEGERI LUBUKLINGGAU



Jalan Depati Said No. 1 Kelurahan Tapak Lebar
Kecamatan Lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau



pn.lubuklinggau@yahoo.co.id (0733) 321570 <http://pn-lubuklinggau.go.id>

KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2022 dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga diucapkan kepada semua pihak, terutama Tim Penyusun sehingga Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dapat rampung sesuai dengan waktu yang ditentukan. Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan ini dimaksudkan sebagai bentuk pertanggungjawaban kami dalam menjalankan tugas pokok selama tahun 2022. Laporan ini disusun sesuai dengan Sistematika Penulisan Laporan yang ditentukan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat nomor 2876/SEK/OT.01.1/12/2022 tanggal 14 Desember 2022 perihal Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2022.

Laporan ini menggambarkan keadaan dan perkembangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau selama Tahun 2022, yaitu keadaan organisasi peradilan secara teknis maupun non teknis, dengan harapan laporan ini dapat dijadikan bahan evaluasi dalam rangka meningkatkan kinerja peradilan yang lebih baik di masa yang akan datang.

Mengetahui
Ketua Pengadilan Negeri
Lubuklinggau

Yunizar Kilat Daya, SH., M.H.
NIP 197106131996031002

Sekretaris
Pengadilan Negeri Lubuklinggau



Patra Sukma, S.Kom., SH., MH.
NIP 197907092009041002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Daftar Isi	ii
Daftar Gambar/Bagan.....	iii
Daftar Tabel.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II ADMINISTRASI PERKARA	4
A. KEADAAN PERKARA TINGKAT PERTAMA	4
B. PENYELESAIAN PERKARA	4
C. PELAYANAN BANTUAN HUKUM	5
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	7
A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA	7
B. MUTASI & PROMOSI	8
C. PENSIUN	9
D. PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	9
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA & PRASARANA SERTA TEKNOLOGI INFORMASI	11
A. PENGELOLAAN KEUANGAN	11
B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA	12
C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI	18
BAB V PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	21
A. AKREDITASI PENJAMINAN MUTU	21
B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU	22
C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK.....	23
BAB VI PENGAWASAN.....	27
A. INTERNAL.....	28
B. EVALUASI.....	30
BAB VII PENUTUP	31
A. KESIMPULAN	31
B. REKOMENDASI	31

Daftar Gambar

Gambar 2.1	Piagam Pos Bantuan Hukum Tahun 2022	5
Gambar 4.1	Anugerah Mahkamah Agung Republik Indonesia.....	19
Gambar 4.2	Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Kelas 1A.....	20
Gambar 5.1	Lampiran Keputusan Dirjen Badilum Tentang Nilai Akreditasi	21
Gambar 5.2	Piagam Penghargaan Penerapan Akreditasi Terbaik.....	22
Gambar 5.3	Piagam Penghargaan Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu.....	23
Gambar 5.4	Layanan Antar Jemput Prioritas dan Manula	24
Gambar 5.5	Surat Keterangan POS	25
Gambar 5.5	Screen Shoot SITAPURANA	25

Daftar Tabel

Tabel 2.1	Rekapitulasi Perkara Berdasarkan Klasifikasi Perkara	4
Tabel 2.2	Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Tahun 2022	5
Tabel 3.1	Daftar Nama Seluruh Personil Pengadilan Negeri Lubuklinggau	7
Tabel 3.2	Daftar Promosi dan Mutasi Tahun 2022	8
Tabel 3.3	Daftar Pensiun Tahun 2022	9
Tabel 3.4	Daftar Pegawai Yang Mengikuti Diklat Tahun 2022	9
Tabel 4.1	Realisasi Anggaran DIPA 01 Tahun 2022.....	11
Tabel 4.2	Realisasi Anggaran DIPA 03 Tahun 2022.....	12
Tabel 4.3	Gedung & Bangunan	13
Tabel 4.4	Daftar Rumah Dinas Pengadilan Negeri Lubuklinggau	16
Tabel 4.5	Daftar Kendaraan Bermotor Pengadilan Negeri Lubuklinggau	16
Tabel 4.6	Daftar Fasilitas Perkantoran	17
Tabel 4.7	Dukungan Teknologi Informasi	18
Tabel 4.8	Perkara Yang Didaftarkan Melalui E-Court.....	18
Tabel 6.1	Daftar Hakim Pengawas Bidang	27

BAB I PENDAHULUAN

Undang-undang Dasar 1945 menegaskan bahwa Indonesia adalah Negara hukum yang salah satu prinsip pentingnya adalah jaminan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Perubahan kebijakan sebagaimana ditegaskan dalam Undang-undang No. 14 Tahun 1970 jo. Undang-undang No. 4 Tahun 2004 yang menjelaskan bahwa segala urusan mengenai peradilan baik yang menyangkut teknis yudisial maupun urusan organisasi, administrasi dan finansial berada satu atap di bawah Mahkamah Agung. Perubahan kebijakan tersebut membawa konsekuensi terhadap beban tugas dan tanggung jawab lembaga peradilan yang semakin luas dan kompleks.

Setelah diberlakukannya Undang-undang No.4 Tahun 2004 dan Keppres No. 21 Tahun 2004, Pengadilan Negeri merupakan Pengadilan tingkat pertama memiliki tugas dan tanggung jawab yang lebih luas yang menuntut perhatian yang lebih besar terhadap tata cara dan pelaksanaan administrasi peradilan, karena bukan saja menyangkut aspek ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi perkara, tetapi juga administrasi umum yang akan memengaruhi kelancaran penyelenggaraan peradilan itu sendiri. Terkait hal tersebut di atas administrasi peradilan dapat dibedakan jenisnya dan dipisahkan penanganannya ke dalam administrasi kepaniteraan dan administrasi kesekretariatan.

Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang merupakan pengadilan tingkat pertama yang bertugas menerima, memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pada tingkat pertama bagi masyarakat para pencari keadilan dengan cakupan wilayah hukum meliputi Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musi Rawas dan Kabupaten Musi Rawas Utara. Pengadilan Negeri Lubuklinggau memiliki visi **“Terwujudnya Pengadilan Negeri Lubuklinggau Yang Agung”**. Dalam upaya

untuk mewujudkan visi tersebut, Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah menyusun beberapa misi antara lain :

1. Mewujudkan Peradilan Yang Sederhana, Cepat, Biaya Ringan dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peradilan Dalam Rangka Peningkatan Pelayanan Pada Masyarakat.
3. Melaksanakan Pengawasan dan Pembinaan Yang Efektif dan Efisien.
4. Melaksanakan Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan Yang Efektif dan Efisien.
5. Mengupayakan Tersedianya Sarana dan Prasarana Peradilan Sesuai Dengan Standar.

Laporan Pelaksanaan Kegiatan merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan visi, misi dan strategi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dengan dipertanggung-jawabkan secara periodik yang dikenal pada tahun yang sudah berjalan sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 143/KMA/SK/VIII/2007 tentang Memberlakukan Buku I pada bagian ketiga (Prosedur Penyampaian Laporan Pelaksanaan Kegiatan).

Pelaporan Pelaksanaan Kegiatan merupakan penjabaran dari berbagai kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja yang disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsinya sebagai Peradilan Tingkat Pertama, Dengan demikian untuk peningkatan kinerja badan Peradilan umum perlu ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang Handal dan tepat guna dan juga mempunyai kualitas keterampilan individu (*skill individual*) yang baik, sehingga jalannya suatu organisasi dapat juga selaras dan berkesinambungan sesuai dengan pedoman yang telah menjadi Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.

Dalam usaha pencapaian tegaknya hukum dan keadilan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Lubuklinggau, maka dibuatlah program kerja yang mencakup hal-hal yang bersifat teknis peradilan dan juga hal-hal yang bersifat non teknis

misalnya sarana dan prasarana demi menunjang visi dan misi Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Segala bentuk kegiatan yang dilaksanakan untuk mencapai visi dan misi Pengadilan Negeri Lubuklinggau terangkum dalam Laporan Pelaksanaan Kegiatan 2022.

BAB II

ADMINISTRASI PERKARA

A. KEADAAN PERKARA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau merupakan Pengadilan Negeri Kelas 1A yang wilayah yurisdiksinya meliputi Kota Lubuklinggau, Kabupaten Musirawas dan Kabupaten Musirawas Utara. Pengadilan Negeri Lubuklinggau memiliki wewenang untuk mengadili perkara Perdata Gugatan dan Permohonan. Sedangkan untuk perkara Pidana Pengadilan Negeri Lubuklinggau mempunyai wewenang untuk mengadili Perkara Pidana antara lain Pidana Biasa, Pidana Cepat, Pidana Singkat dan Pidana Khusus Anak.

Tabel 2.1
Rekapitulasi Perkara Berdasarkan Klasifikasi Perkara

No.	Aspek	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Sisa Tahun Ini
1.	Pidana Biasa	127	722	736	113
2.	Pidana Singkat	0	0	0	0
3.	Pidana Cepat	0	41	41	0
4.	Perkara Lalu Lintas	0	4817	4817	0
5.	Pidana Anak	3	43	46	0
6.	Praperadilan	1	1	2	0
7.	Gugatan	20	52	46	26
8.	Permohonan	2	77	74	5
9.	Gugatan Sederhana	5	57	48	14
Total		155	5810	5810	158

B. PENYELESAIAN PERKARA

Pada awal tahun 2022 Pengadilan Negeri Lubuklinggau memprioritaskan penyelesaian perkara tahun lalu yang menjadi tunggakan atau belum terselesaikan tanpa mengesampingkan kualitas putusan. Keadaan perkara Pengadilan Negeri Lubuklinggau Tahun 2022 sebagai berikut :

Tabel 2.2
Rekapitulasi Penyelesaian Perkara Tahun 2022

No.	Aspek	Jumlah Perkara	Capaian	Presentase
1.	Perkara Perdata yang diselesaikan tepat waktu	169	152	89.9%
2.	Perkara Pidana yang diselesaikan tepat waktu	825	824	99.8%
3.	Jumlah Perkara Perdata Yang Berhasil Dimediasi	37	2	5.4%
4.	Jumlah Perkara Anak Yang Berhasil Melalui Diversi	5	2	40%

C. PELAYANAN BANTUAN HUKUM

Pelayanan Bantuan Hukum diperuntukan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan agar mendapatkan Pelayanan di Pengadilan. Beberapa Pelayanan untuk masyarakat kurang mampu adalah sebagai berikut :

1. Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM)

Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tahun 2022 mendapatkan anggaran untuk menyelenggarakan Pos Bantuan Hukum dengan anggaran sebesar Rp. 24.000.000,- (Dua Puluh Empat Juta Rupiah) untuk 240 Jam Pelayanan. Untuk melaksanakan Program tersebut Pengadilan Negeri Lubuklinggau bekerjasama dengan Lembaga Bantuan Hukum Posbakum ADIN yang berdomisili di Kota Lubuklinggau.



Gambar 2.1
Piagam Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Tahun 2022

Dalam pelaksanaan Pos Bantuan Hukum, Pengadilan Negeri Lubuklinggau mendapatkan Penghargaan dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Berupa Harapan 1 Lomba Pelaksanaan Pos Bantuan Hukum Tahun 2022.

2. Sidang diluar Gedung Pengadilan

Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tahun 2022 tidak memiliki program Sidang diluar Gedung Pengadilan.

3. Perkara Prodeo

Salah satu bentuk layanan hukum yang diberikan Pengadilan kepada masyarakat yang kurang mampu adalah perkara prodeo. Prodeo adalah pembebasan biaya perkara bagi masyarakat kurang mampu sehingga dalam berperkara di pengadilan, masyarakat kurang mampu tidak mengeluarkan biaya sama sekali. Pada pelaksanaannya prodeo terdiri dari prodeo murni dan prodeo menggunakan anggaran APBN. Pada tahun 2022 tidak ada permohonan perkara secara prodeo yang masuk ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

BAB III SUMBER DAYA MANUSIA

A. KOMPOSISI SUMBER DAYA MANUSIA

Pengadilan Negeri Lubuklinggau hingga laporan ini dibuat mempunyai total 38 personil yang terdiri dari 11 Orang Hakim, 27 Orang Pegawai dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 3.1

Daftar Nama seluruh personil Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tahun 2022

No	Nama	Jabatan	Pangkat/Gol	Pendidikan
1.	Yunizar Kilat Daya, S.H., M.H	Ketua	IV/b	S2
2.	Agung Nugroho, S.H	Wakil Ketua	IV/b	S2
3.	Afif Januarsyah, S.H.,M.H	Hakim	IV/a	S2
4.	Tyas Listiani, S.H., M.H.	Hakim	III/d	S2
5.	Yulia Marhaena, S.H., M.H.	Hakim	III/d	S2
6.	Lina Safitri Tazili, S.H	Hakim	III/d	S1
7.	Verdian Martin, S.H	Hakim	III/d	S1
8.	Ferri Irawan, S.H., M.H.	Hakim	III/d	S2
9.	Rizal Firmansyah, S.H.M.H	Hakim	III/d	S2
10.	Marselinus Ambarita, S.H., M.M.	Hakim	III/d	S2
11.	Amir Rizki Apriadi, S.H., M.H.	Hakim	III/d	S2
12.	Irsanudin, SH., M.H.	Panitera	IV/a	S2
13.	Patra Sukma, S.Kom., S.H., M.H.	Sekretaris	III/d	S2
14.	Wahyu Agus Susanto, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	III/c	S2
15.	Armen, A.Md.	Panitera Muda Perdata	III/c	DIII
16.	Dedy Sohaidi, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	III/c	S2
17.	Rusmiati	Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tatalaksana	III/d	SMA
18.	Mulyati, S.Sos.	Kasubbag Umum dan Keuangan	III/d	S1
19.	Anderiansyah, S.Kom., M.A.P.	Kasubbag Perencanaan, TI dan Pelaporan	III/c	S2
20.	Alexander Pratama Hutajulu, S.H	Panitera Pengganti	III/C	S1

21.	Efendi Sulistiyo, S.T., S.H.	Panitera Pengganti	III/C	S1
22.	Iwan Stiawan, S.T., S.H.	Panitera Pengganti	III/C	S1
23.	Marlinawati	Panitera Pengganti	III/c	SMA
24.	Alkautsari Dewi Adha, A.Md	Panitera Pengganti	III/b	DIII
25.	Rahmad Wahyudi, SH	Panitera Pengganti	III/b	S1
26.	Emi Huzaimah, A.Md	Panitera Pengganti	III/b	DIII
27.	Rusman Edwar, S.Kom	Jurusita	III/b	S1
28.	Yosrizal, SH.	Jurusita Pengganti	III/a	S1
29.	Leni Sartika, S.H	Bendahara Pengeluaran	III/a	S1
30.	Riska Gita Anggraini, SH	Analisis Perkara Peradilan	III/a	S1
31.	Novi Arni, S.H.	Pengadministrasi Registrasi Perkara	III/a	S1
32.	Ardi	Pengadministrasi Registrasi Perkara	III/a	SMA
33.	Nevi Ermi Nengsih, S.E	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	III/a	S1
34.	Roli Rahmadya, A.Md	Pengelola Barang Milik Negara	II/d	DIII
35.	Sarah Attachira, A.Md	Pengelola Sistem Dan Jaringan	II/c	DIII
36.	Siska Rince Manalu, A.Md	Pengadministrasi Registrasi Perkara	II/c	DIII
37.	Mutia Fadilah, A.Md	Pengelola BMN	II/c	DIII
38.	Dwi Friskasari, A.Md.A.B	Pengelola Perkara	II/c	DIII

B. Mutasi dan Promosi

Selama tahun 2022 terdapat beberapa mutasi Hakim dan pegawai baik mutasi masuk maupun mutasi keluar, mutasi tersebut antara lain sebagai berikut :

Tabel 3.2
Daftar Promosi dan Mutasi Tahun 2022

No	Nama	Jenis Mutasi	Jabatan/ Satuan Kerja Asal	Jabatan/ Satuan Kerja Tujuan	TMT
1.	Nevi Ermi Nengsih, S.E	Masuk	CPNS Analis Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan	CPNS Pengadilan Negeri Lubuklinggau	01/04/2022
2.	Mutia Fadilah, A.Md	Masuk	CPNS Pengelola BMN	CPNS Pengadilan Negeri Lubuklinggau	01/04/2022
3.	Dwi Friskasari, A.Md.A.B	Masuk	CPNS Pengelola Perkara	CPNS Pengadilan Negeri Lubuklinggau	01/04/2022

4.	Wijawiyata, S.H	Masuk	Ketua Pengadilan Negeri Teluk kuantan	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau	20/04/2022
5.	Alexander Pratama Hutajulu, S.H	Masuk	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuklinggau	27/10/2022
6.	Efendi Sulistiyo, S.T., S.H.	Masuk	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Muara Enim	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuklinggau	27/10/2022
7.	Iwan Stiawan, S.T., S.H.	Masuk	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Prabumulih	Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Lubuklinggau	28/11/2022
8.	Yunizar Kilat Daya, S.H.,M.H	Masuk	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Pinang	Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau	20/12/2022
9.	Imam Santoso, S.H	Keluar	Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau	Wakil Ketua Lubuk Pakam	23/12/2022
10.	Wijawiyata, S.H	Keluar	Wakil Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau	Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sitoli	28/12/2022

C. Pensiun

Dalam kurun waktu dari Januari s/d Desember 2022 terdapat 2 Orang yang pensiun pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau. Pegawai yang pensiun antara lain sebagai berikut.

Tabel 3.3
Daftar Pensiun Tahun 2022

No.	Nama	Jabatan	Pangkat Golongan/ Ruang	Ket
1.	ZAINAL ABIDIN, S.Sos NIP.196101011985031006	Panitera Muda Pidana	Penata Tingkat I III/d	Mencapai BUP TMT Februari 2022
2.	SYAMSIAH DUSU NIP.196412291997032001	Juru Sita Pengganti	Penata Muda TK. I III/b	Mencapai BUP TMT Desember 2022

D. Pendidikan dan Pelatihan

Pada tahun 2022 terdapat 2 orang yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan.

Tabel 3.4
Pegawai yang mengikuti diklat tahun 2022

No.	Nama	Jabatan	Nama Diklat	Ket
1.	AMIR RIZKI APRIADI, S.H.,M.M	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	19 Maret 2022
2.	TRI LESTARI, SH.,MH	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	19 Maret 2022
3.	TYAS LISTIANI, S.H.,M.H	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	19 Maret 2022

4.	YULIA MARHAENA, S.H	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	19 Maret 2022
5.	LINA SAFITRI TAZINI, S.H.,M.H	Hakim	Pelatihan Teknis Yudisial Hak Kekayaan Intelektual (HKI)	19 Maret 2022
6.	MARSELINUS AMBARITA, S.H.,M.H	Hakim	Diklat Perkara Gugatan Sederhana (Small Claim Court)	13 Mei 2022
7.	YULIA MARHAENA, S.H	Hakim	Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup	31 Mei 2022
8.	FERI IRAWAN, S.H.,M.H	Hakim	Diklat Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup	31 Mei 2022
9.	NOVI ARNI, S.H	Analisis Perkara Peradilan	Latihan Dasar CPNS Golongan III	14 Juni 2022
10.	SISKA RINCE MANALU, A.Md	Pengelola Perkara	Latihan Dasar CPNS Golongan II	28 Juni 2022
11.	ROLI RAHMADIYAH, A.Md	Pranata Kearsipan	Bimtek Kesekretariatan Di Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang	24 s/d 26 Agustus 2022
12.	NEVI ERMI NENGSIH, SE	Analisis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Bimtek Kesekretariatan Di Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang	24 s/d 26 Agustus 2022
13.	SARAH ATTACHIRAH, A.Md.T	Pengelola Kepegawaian	Bimtek Kesekretariatan Di Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang	24 s/d 26 Agustus 2022
14.	MARSELINUS AMBARITA, S.H.,M.H	Hakim	Diklat Sertifikasi SPPA	24 September 2022

BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA & PRASARANA SERTA TEKNOLOGI INFORMASI

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Anggaran keuangan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tertuang dalam Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran atau sering dikenal dengan DIPA. Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tahun 2022 memiliki 2 DIPA, yakni DIPA Badan Urusan Administrasi dengan Nomor : DIPA-005.01.2.098970/2022 dengan total pagu Rp. 6.882.835.000,- (Enam Milyar Delapan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Delapan Ratus Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) dan DIPA Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor : DIPA-005.03.2.099229/2022 dengan total pagu Rp. 390.180.000,- (Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah).

1. DIPA Badan Urusan Administrasi (01)

DIPA Badan Urusan Administrasi meliputi anggaran belanja gaji pegawai, belanja barang Operasional, Belanja Barang Non Operasional dan belanja modal. Berikut disajikan secara rinci anggaran pada tahun 2022.

Tabel 4.1
Realisasi Anggaran DIPA 01

No	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1.	1066.962	Layanan Umum [Base Line]				
2.	051	Non Operasional Satker Daerah	100.000	0	100.000	0,00
3.	1066.994	Layanan Perkantoran [Base Line]				
4.	001	Gaji dan Tunjangan	4.702.680.000	4.628.281.677	74.398.323	98,42
5.	002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	2.066.055.000	2.039.383.856	26.671.144	98,71
4.	1071.951	Layanan Internal (<i>Overhead</i>) [Base Line]				
6.	052	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	64.000.000	63.378.000	622.000	99,03
7.	053	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	20.000.000	20.000.000	0	100
8.	1071.971	Layanan Prasarana Internal (<i>Overhead</i>) [Base Line]				
9.	051	Pembangunan/Renovasi Gedung dan Bangunan	30.000.000	29.860.000	140.000	99,53
Total			6.882.735.000	6.780.903.533	101.931.467	98,52

2. DIPA Dirjen Badilum (03)

DIPA Dirjen Badilum meliputi anggaran belanja Pos Bantuan Hukum dan Penyelesaian perkara di tingkat pertama. Berikut disajikan secara rinci anggaran pada tahun 2022.

Tabel 4.2
Realisasi Anggaran DIPA 01

No	Akun	Uraian	Pagu	Realisasi	Sisa	%
1.	1049.001	Percepatan Penyelesaian Perkara				
2.	052	Dukungan Penyelesaian Perkara	1.500.000	450.000	1.050.000	30,00
3.	1049.005	PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN DI TINGKAT PERTAMA DI WILAYAH PALEMBANG				
4.	051	Pendaftaran Berkas Perkara	139.440.000	139.205.500	234.500	99,83
5.	052	Penetapan Majelis Hakim, PP dan Hari Sidang	47.530.000	45.990.000	1.540.000	96,76
6.	053	Pemeriksaan Disidang Pengadilan	38.720.000	36.115.000	2.605.000	93,27
7.	054	Minutasi	21.000.000	20.959.000	41.000	99,80
8.	055	Pengiriman Salinan Putusan Kepada JPU & Terdakwa	46.410.000	45.850.000	560.000	98,79
9.	056	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	52.220.000	51.380.000	840.000	98,39
10.	057	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	8.610.000	6.829.800	1.780.200	79,32
11.	058	Penanganan Perkara Kasasi & PK	10.750.000	8.183.100	2.566.900	76,12
12.	1049.032	Layanan Pos Bantuan Hukum [Base Line]				
13.	051	Pos Bantuan Hukum	24.000.000	24.000.000	0	100%
Total			390.180.000	378.962.400	11.217.600	97,13

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Pengelolaan sarana dan prasarana adalah kegiatan mengendalikan, menyelenggarakan, mengurus, menjalankan dan memanfaatkan sarana dan prasarana agar tetap dalam kondisi yang baik sehingga tujuan organisasi dapat dicapai. Sarana dan prasarana yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Lubuklinggau meliputi Gedung dan Bangunan, Tanah, Kendaraan Bermotor serta fasilitas perkantoran.

1. Gedung dan Bangunan

Tabel 4.3
Gedung & Bangunan

No.	Jenis Sarana	Uraian	Keterangan
1	GEDUNG KANTOR	Tanah Gedung Kantor	- Luas Tanah 4.530 M ² - Sertifikat Hak Pakai Nomor 09 / Sidorejo Tahun 1988 An. Pemerintah Republik Indonesia C.q. Mahkamah Agung Republik Indonesia
		Bangunan Gedung Kantor	- Dibangun Tahun 1974 - Luas Bangunan 1.120 M ² - Belum Prototipe (Sedang Dilakukan Pembangunan) - Alamat Jl. Depati Said No.1 Kelurahan Tapak Lebar Kecamatan Lubuklinggau Barat I Kota Lubuklinggau
2	RUANG KERJA	Ruang Ketua	- Luas Ruang 35 M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Wakil Ketua	- Luas Ruang 32M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Hakim	- Luas Ruang 96 M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Panitera	- Luas Ruang 32 M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Panitera Muda	- Luas Ruang 54 M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Panitera Pengganti	- Luas Ruang 30 M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Juru sita dan Juru Sita Pengganti	- Luas Ruang 30 M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Sekretaris	- Luas Ruang 12 M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Kepala Sub Bagian	- Luas Ruang 12 M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Kesekretariatan	- Luas Ruang 12M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Jaksa Penuntut Umum	- Luas Ruang 12M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Penasihat Hukum	- Luas Ruang 12M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Rapat	- Luas Ruang 28M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Perpustakaan	- Luas Ruang 54 M ² - Terdapat 7.750 Buah Koleksi Buku - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Arsip	- Luas Ruang 60 M ² - Dilengkapi Dengan Komputer Untuk Pengarsipan Secara Elektronik - Dilengkapi Rak Arsip Terbuat Dari Besi/Metal - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Gudang	- Luas Ruang 60 M ²
Ruang Server	- Luas Ruang 4 M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)		

		Ruang Poliklinik	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 9 M² - Dilengkapi dengan Obat-Obatan Pertolongan Pertama Pada Kecelakaan (PPPK) - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
		Ruang Toilet Pegawai Pria	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 2 Unit - Ukuran Masing-Masing 6 M²
		Ruang Toilet Pegawai Wanita	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 2 Unit - Ukuran Masing-Masing 6 M²
		Ruang Tamu Terbuka	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat pada Bagian Depan Gedung (Lobi) - Dilengkapi Dengan Sofa - Ruangan Terbuka (Tidak Tertutup) - Sesuai dengan SE Dirjen Badilum Nomor 1/DJU/SE/V/2012 Tentang Penyediaan Ruang Tamu Terbuka Pada Pengadilan Negeri Seluruh Indonesia
3	SARANA LINGKUNGAN GEDUNG KANTOR	Pagar Keliling	<ul style="list-style-type: none"> - Panjang Pagar 286 M - Tinggi ± 3 Meter - Terbuat dari Beton (Batu Bata)
		Pos Jaga	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 6 M² - Terdapat pada bagian depan Gedung kantor
		Tempat Parkir Kendaraan	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 2 area parkir yaitu parkir Kendaraan Roda 2 dan Roda 4
		Akses Jalan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengerasan Jalan Menggunakan <i>Paving Block</i>
		Taman	<ul style="list-style-type: none"> - Dilengkapi dengan Bunga dan Pohon Hias - Terdapat Kolam Ikan Koi
		Akses Difabel	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat jalur Khusus untuk penyandang disabilitas - Terdapat Step (Ram) pada Lobi Kantor untuk penyandang disabilitas yang menggunakan Kursi Roda
		Kamera Keamanan (CCTV)	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 16 Titik Kamera CCTV <i>Full HD</i>
4	RUANG PELAYANAN	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 96 M² - Terletak di Bagian Gedung Kantor (Lobi Gedung) - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) - Dilengkapi Dengan Televisi - Dilengkapi Dengan Media Informasi - Dilengkapi Dengan Komputer Untuk Proses Pelayanan - Dilengkapi Dengan Kursi Tunggu - Dilengkapi Dengan Mesin Antrean - Dilengkapi Dengan WIFI untuk Pengguna Layanan - Dilengkapi Dengan Kursi Roda Untuk Penyandang Disabilitas - Dilengkapi Dengan Toilet - Dilengkapi Dengan Air Minum dan Gelas Untuk Pengguna Layanan - Dilengkapi Dengan <i>Charger Box</i>
		Loket Pembayaran (Kasir)	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 5 M² - Terdapat pada Lobi Pengadilan (satu area dengan PTSP) - Tersedia Mesin EDC (<i>Electronic Data</i>

		<i>Capture)</i>
	Ruang Sidang	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 3 Ruang Sidang (Cakra, Candra dan Tirta) - Luas Ruangan Masing-Masing Cakra : 120 M² Candra : 70 M² Tirta : 70 M² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) di setiap Ruangannya - Dilengkapi Dengan sarana dan Prasarana Ruang Sidang Seperti mebel, Bendera, Lambang Garuda, Palu dan Lain-lain
	Ruang Sidang Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Terdapat 1 Ruang Sidang Anak - Luas Ruangan 50 M² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) - Sesuai Dengan Keputusan Dirjen Badilum Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 Tentang Pedoman Standar Minimal Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak
	Ruang Tunggu Sidang	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 150 M² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) - Dilengkapi Dengan Televisi - Dilengkapi Dengan Media Informasi - Dilengkapi Dengan Kursi Tunggu - Dilengkapi Dengan Petugas Informasi Persidangan (Konfirmasi & Antrean Sidang) - Dilengkapi Dengan WIFI untuk Pengunjung Sidang - Dilengkapi Dengan Kursi Roda Untuk Penyandang Disabilitas - Dilengkapi Dengan Toilet Perempuan dan Laki-Laki - Dilengkapi Dengan Air Minum dan Gelas Untuk Pengguna Layanan - Dilengkapi Dengan <i>Charger Box</i>
	Ruang Pos Pelayanan Hukum	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 12 M² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC)
	Ruang Informasi Persidangan (Konfirmasi dan Antrean Sidang)	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 12 M² - Dilengkapi Dengan Antrean Sidang - Dilengkapi Dengan Pengeras Suara
	Ruang Tahanan Pria	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 60 M² - Dilengkapi Dengan Toilet - Dilengkapi Dengan Perlengkapan Ibadah
	Ruang Tahanan Wanita	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 60 M² - Dilengkapi Dengan Toilet - Dilengkapi Dengan Perlengkapan Ibadah
	Ruang Ramah & Tunggu Anak	<ul style="list-style-type: none"> - Luas Ruangan 30 M² - Terpisah Antara Anak Laki-Laki dan Anak Perempuan - Dilengkapi Dengan Toilet (Laki-Laki dan Perempuan) - Dilengkapi Dengan Buku-Buku Anak dan Perlengkapan Ibadah - Sesuai Dengan Keputusan Dirjen Badilum Nomor 2176/DJU/SK/PS01/12/2017 Tentang Pedoman Standar Minimal

			Sarana dan Prasarana Pengadilan Ramah Anak
	Ruang Mediasi	- Luas Ruang 30 M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) - Dilengkapi Dengan Meubelair	
	Ruang Kaukus	- Luas Ruang 30 M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) - Dilengkapi Dengan Meubelair	
	Ruang Laktasi	- Luas Ruang 24 M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) - Dilengkapi Dengan Tempat Tidur Untuk Menyusui	
	Toilet Umum Pria	- Luas Ruang 6 M ² - Terdapat 2 Toilet Pria	
	Toilet Umum Wanita	- Luas Ruang 6 M ² - Terdapat 2 Toilet Wanita	
	Toilet Khusus Difabel	- Luas Ruang 6 M ²	
	Mushallah	- Luas Ruang 45 M ² - Dilengkapi Dengan Pendingin Udara (AC) - Dilengkapi Dengan Tempat Wudu - Dilengkapi Dengan Pengeras Suara - Dilengkapi Dengan Peralatan Ibadah	

2. Rumah Dinas

Tabel 4.4
Daftar Rumah Dinas Pengadilan Negeri Lubuklinggau

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			B	RR	RB	
1.	Rumah Negara Golongan I Tipe B Permanen	2	1	0	1	
2.	Rumah Negara Golongan I Tipe C Permanen	9	9	0	0	
Total		11	10	0	1	

3. Kendaraan Bermotor

Tabel 4.5
Daftar Kendaraan Bermotor Pengadilan Negeri Lubuklinggau

No	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			B	RR	RB	
Kendaraan Bermotor Roda 4						
1.	Nissan Terano	1	√			
2.	Innova	1	√			
3.	Avanza	2	√			
Kendaraan Bermotor Roda 2						
1.	Honda Supra	3	√			

4. Fasilitas Perkantoran

Tabel 4.6
Daftar Fasilitas Perkantoran

No	Uraian	Jumlah	Ket
1.	Lemari Penyimpan	1	Baik
2.	Mesin Ketik Listrik Standard (14-16)	1	Baik
3.	Lemari Besi/Metal	11	Baik
4.	Lemari Kayu	1	Baik
5.	Rak Kayu	10	Baik
6.	Brandkas	3	Baik
7.	Hand Metal Detector	1	Baik
8.	LCD Projector/Infocus	1	Baik
9..	Proyector Spider Bracket	2	Baik
10.	Meja Kerja Besi/Metal	1	Baik
11.	Meja Kerja Kayu	63	Baik
12.	Kursi Besi/Metal	129	Baik
13.	Kursi Kayu	82	Baik
14.	Sice	4	Baik
15.	Bangku Panjang Kayu	6	Baik
16.	Meja Rapat	2	Baik
17.	Partisi	6	Baik
18.	Meubelair Lainnya	1	Baik
19.	A.C. Split	24	16 Baik, 8 Rusak Ringan
20.	Televisi	6	Baik
21.	Loudspeaker	5	Baik
22.	Microphone	1	Baik
23.	Mimbar/Podium	1	Baik
24.	Palu Sidang	3	Baik
25.	Lambang Instansi	1	Baik
26.	Gordyin/Kray	1	Baik
27.	Bracket Standing Peralatan	4	Baik
28.	Audio Amplifier	1	Baik
29.	Uninterruptible Power Supply (UPS)	7	Baik
30.	Video Mixer	1	Baik
31.	Camera Digital	1	Baik
32.	Camera Conference	1	Baik
33.	Alat Kesehatan Umum Lainnya	1	Baik
34.	Komputer Phantombild	4	Baik
35.	Komputer Jaringan Lainnya	1	Baik
36.	P.C Unit	38	Baik
37.	Lap Top	20	Baik
38.	Tablet PC	1	Baik
39.	Komputer Unit Lainnya	1	Baik
40.	Serial Printer	1	Baik
41.	CPU (Peralatan Personal Komputer)	1	Baik
42.	Printer (Peralatan Personal Komputer)	23	Baik
43.	Scanner (Peralatan Personal)	2	Baik
44.	Server	2	Baik
45.	Router	1	Baik
46.	Rak Server	1	Baik
47.	Closed Circuit Television (CCTV)	1	Baik

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dukungan penerapan teknologi informasi yang dilakukan pada tahun 2022 antara lain pengadaan jaringan Internet *dedicated* 1:1 dengan *Bandwidth* sebesar 60 Mbps, serta Pengadaan PC bagi Panitera.

Tabel 4.7
Dukungan Teknologi Informasi

No	Uraian	Jumlah	Ket
1.	Jaringan	1	<i>Dedicated</i> 1:1 60Mbps
2.	Laptop/PC	61	
3.	Server	2	Server SIP & Aplikasi Lainnya
4.	Printer	24	
5.	Scanner	2	

1. Implementasi E-Court

Penerapan Electronic Court atau sering dikenal dengan istilah E-Court pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah dimulai sejak tahun 2018. Pada tahun 2022 perkara yang didaftarkan melalui ecourt adalah sebagai berikut.

Tabel 4.8
Perkara yang didaftarkan melalui E-Court

No	Uraian	Daftar Melalui E-Court	Sepakat E-Litigasi	Banding Melalui E-Court
1.	Gugatan	51	12	11
2.	Gugatan Sederhana	57	0	0
3.	Bantahan	1	0	0
4.	Permohonan	77	0	0
Total		186	12	11

Dalam pelaksanaan peradilan elektronik, Pengadilan Negeri Lubuklinggau juga mendapatkan Penghargaan dari Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Anugerah Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Peringkat 2 Pengadilan Terbaik dalam pelaksanaan Peradilan Elektronik Kategori Pengadilan Negeri Dengan Beban Perkara 1001-2000.



Gambar 4.1
Anugerah Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Pekara (SIPP)

Penerapan Sistem Informasi Penelusuran Perkara di Pengadilan Negeri Lubuklinggau pada tahun 2022 sudah baik. Hal tersebut terbukti dari

penilaian Evaluasi Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (EIS) yang selalu mencukupi atau memenuhi target yang telah ditetapkan. Dengan tercapainya nilai EIS yang konstan setiap tahun maka Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah diberikan izin oleh Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum untuk menggunakan register elektronik secara penuh dan meniggalkan register manual. Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Lubuklinggau mendapatkan nilai Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) Sebesar 984.54. Dengan nilai tersebut Pengadilan Negeri Lubuklinggau berhasil menduduki peringkat ke 2 Pengadilan Negeri Kelas 1A seluruh Indonesia.

#	JUMLAH PERKARA	KELAS	PENGADILAN	KINERJA	KEPATUHAN	KELENGKAPAN	KESESUAIAN	TOTAL
1	501-1000	IA	Pengadilan Negeri Sukoharjo	152.99	544.52	120.49	169.66	987.66
2	1001-2000	IA	Pengadilan Negeri Lubuk Linggau	150.02	544.72	120.98	169.82	985.54
3	501-1000	IA	Pengadilan Negeri Watampone	151.95	541.91	120.88	169.76	984.50
4	501-1000	IA	Pengadilan Negeri Klaten	154.30	536.75	120.56	169.90	981.51
5	>2000	IA	Pengadilan Negeri Mojokerto	153.13	537.10	120.97	169.39	980.59
6	1001-2000	IA	Pengadilan Negeri Tulungagung	157.60	544.92	108.08	169.72	980.32
7	>2000	IA	Pengadilan Negeri Malang	152.42	536.23	120.75	169.67	980.32

Gambar 4.2
Evaluasi Implementasi SIPP Pengadilan Negeri Kelas 1A Tahun 2022

BAB V

PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

Pengadilan Negeri Lubuklinggau selalu berupaya untuk meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat. Berikut beberapa program yang dilakukan Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam meningkatkan Pelayanan kepada masyarakat.

1. Akreditasi Penjaminan Mutu

Pada tahun 2022 telah dilakukan dua kali Surveillance Akreditasi. Yang pertama dilakukan oleh Asessor dari Pengadilan Tinggi Palembang dan yang terakhir oleh Asessor dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Dari Surveillance tersebut terdapat beberapa kekurangan yang ditemui dan kedepannya direkomendasikan untuk diperbaiki dan ditingkatkan. Dari assessment yang dilakukan tersebut, Pengadilan Negeri Lubuklinggau melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2477/DJU/SK/OT.01.3/12/2022 Tentang Nilai Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Tinggi, Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus dan IA Tahun 2022 mendapatkan nilai sebesar 733 dan mendapatkan predikat "A".

PETIKAN					
DAFTAR LAMPIRAN					
KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM					
NOMOR 2477/DJU/SK/OT.01.3/12/2022					
TANGGAL 9 DESEMBER 2022					
NO.	NAMA PENGADILAN	TIPE	NILAI AKREDITASI 2021	NILAI AKREDITASI 2022	PREDIKAT
1 s/d 54	dst.				
55	Pengadilan Negeri Lubuklinggau	IA	728	733	A
56 s/d 98	dst.				

Gambar 5.1
Lampiran Keputusan Dirjen Badilum tentang Nilai Akreditasi

Berkaitan dengan Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu, Pengadilan Negeri Lubuklinggau dalam rangka lomba Pelaksanaan Akreditasi Penjaminan Mutu Tahun 2022 yang diadakan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum. Pengadilan Negeri Lubuklinggau berhasil mendapatkan Peringkat II Pengadilan Negeri Kelas 1A. hal tersebut ditetapkan melalui keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2474/DJU/SK/HM.02.3/12/2022 tentang penetapan lomba bagi satuan kerja di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022.



Gambar 5.2

Piagam Penghargaan Penerapan Terbaik Akreditasi Penjaminan Mutu Pada Pengadilan Negeri Kelas 1A

2. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah dilaksanakan pada tahun 2018 tepatnya bulan maret 2018. Seluruh pelayanan di Kepaniteraan di jadikan satu pintu, sehingga masyarakat yang membutuhkan pelayanan akan dilayani dari awal hingga selesainya layanan di

satu pintu. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kualitas pelayanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau kepada masyarakat.

Pada tahun 2022 Pengadilan Negeri Lubuklinggau mendapatkan Juara Harapan 3 kategori Pengadilan Negeri Kelas 1B terbaik dalam lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum melalui Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 2474/DJU/SK/HM.02.3/12/2022 tentang Penetapan Pemenang Lomba Bagi Satuan Kerja di Lingkungan Peradilan Umum Tahun 2022.



Gambar 5.3
Piagam Penghargaan Lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tahun 2022

3. Inovasi Pelayanan Publik

Dalam rangka meningkatkan Pelayanan publik, Pengadilan Negeri Lubuklinggau melakukan beberapa inovasi antara lain:

a) Layanan Antar Jemput Prioritas dan Manula (LAJU PRIMA)

LAJU PRIMA adalah Inovasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang di prioritaskan untuk pengguna layanan penyandang disabilitas dan lanjut usia yang perlu sarana/ bantuan untuk pergi ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau.



Gambar 5.4
Layanan Antar Jemput Prioritas dan Manula

Dalam hal ini pengguna layanan terlebih dahulu harus menghubungi petugas melalui Telepon/WA/Zoom Pengadilan Negeri Lubuklinggau, kemudian petugas akan memproses dan menghubungi kembali pengguna layanan. Selanjutnya petugas akan mendatangi pengguna layanan ke rumah mereka masing-masing untuk membantu antar jemput pengguna layanan yang akan membuat keperluan di kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau

seperti surat keterangan dan lain sebagainya. Setelah selesai petugas layanan Pengadilan Negeri Lubuklinggau akan mengantarkan kembali pengguna layanan ke rumah masing-masing.

b) Surat Keterangan POS (SUKET POS)

Suket Pos atau Surat Keterangan Pos adalah suatu inovasi Pengadilan Negeri Lubuklinggau yang bekerja sama dengan PT Pos Indonesia yang bertujuan mempermudah masyarakat Kabupaten Musi Rawas dan Musi Rawas Utara khususnya untuk membuat surat keterangan di Pengadilan Negeri Lubuklinggau.



Gambar 5.5
Surat Keterangan POS

Dalam hal ini masyarakat atau pemohon untuk membuat surat keterangan tidak perlu lagi datang ke Kantor Pengadilan Negeri Lubuklinggau melainkan hanya datang ke kantor pos terdekat. Pemohon secara mandiri mengakses aplikasi eRATERANG kemudian melengkapi persyaratannya dan mengirimkannya langsung ke kantor Pos. Permohonan akan diterima langsung oleh petugas pos dan sebelum dikirimkan akan diteliti print out surat permohonan dan persyaratan yang dibuat oleh pemohon.

Petugas pos juga akan menjelaskan dan meminta biaya pembuatan surat keterangan berupa PNPB sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), biaya materai serta biaya pengiriman surat keterangan ini untuk pengiriman

ke Pengadilan dan pengiriman kembali lagi ke alamat pemohon. Kemudian kantor pos akan mengirimkan permohonan surat keterangan beserta persyaratan termasuk KTP dan SKCK asli serta PNPB ke Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

Setelah diterima di Pengadilan Negeri Lubuklinggau petugas akan memeriksa dokumen permohonan dan memproses surat keterangan tersebut. Apabila sudah selesai surat keterangan akan dikirimkan ke alamat mereka masing-masing melalui Pos beserta dengan persyaratan asli berupa KTP dan SKCK pemohon tersebut.

c) Sistem Informasi Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana (SITAPURANA)

SITAPURANA atau Sistem Informasi Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana adalah penyampaian putusan pidana secara elektronik kepada terdakwa, Lembaga Pemasyarakatan, Jaksa Penuntut Umum dan Juga Penyidik. Aplikasi ini digunakan untuk mempercepat penyampaian putusan perkara pidana kepada para pihak dan juga Aparat Penegak Hukum. Dengan dipercepatnya pengiriman salinan putusan kepada para pihak maka diharapkan eksekusi terhadap terdakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dapat dipercepat yang nantinya juga dapat mengurangi *Over Stay* pada Lembaga Pemasyarakatan.



The screenshot displays the 'Data Putusan Perkara Pidana Yang Belum Dikirim' (Data of Criminal Judgments Not Yet Sent) interface. It features a table with columns for 'No.', 'Nomor Perkara', 'Nama Pihak', 'E-Doc TTE', 'Lembaga Pemasyarakatan', and 'Aksi'. Two entries are visible, each with a 'Kirim' button. A red banner at the top indicates that judgments will be sent automatically via WhatsApp and E-Mail at 09:00 WIB and 15:00 WIB. A search bar and action buttons (Copy, CSV, Print, Excel, PDF) are also present.

No.	Nomor Perkara	Nama Pihak	E-Doc TTE	Lembaga Pemasyarakatan	Aksi
1	633/Pid.B/2021/PN Llg Tanggal Putusan : 29/11/2021	Penuntut Umum: Yesi Imelda, SH Terdakwa: Agung Prayogo bin Zaini		LAPAS KELAS II A LUBUK LINGGAU	
2	630/Pid.Sus/2021/PN Llg Tanggal Putusan : 24/11/2021	Penuntut Umum: Trian Febriansyah, SH., MH. Terdakwa: Efendi Ayatullah bin Kabul		LAPAS NARKOTIKA KELAS II A MUARA BELITI	

Gambar 5.6

Screenshoot Sistem Informasi Pemberitahuan Putusan Perkara Pidana (SITAPURANA)

BAB VI PENGAWASAN

Pengawasan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau berpedoman kepada Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/080/SK/VIII/2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan Di Lingkungan Lembaga Peradilan. Terdapat 2 jenis pengawasan yakni :

1. Pengawasan Melekat

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh atasan langsung terhadap bawahannya secara preventif dan represif agar pelaksanaan tugas bawahan tersebut berjalan secara efektif dan efisien sesuai dengan rencana kegiatan dan peraturan perundang-undangan.

2. Pengawasan Fungsional

Yaitu pengawasan yang dilakukan oleh Badan Pengawas Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Menindaklanjuti hal tersebut Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau menerbitkan surat keputusan Nomor : W6.U5/08/KP.04.1/01/2023 Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang dengan susunan sebagai berikut :

Tabel 6.1
Hakim Pengawas Bidang

No	Nama	Bidang Pengawasan
1.	Agung Nugroho, S.H	Koordinator
2.	Afif Januarsyah, S.H.,M.H	Pidana
3.	Tyas Listiani, S.H., M.H.	PTSP
4.	Yulia Marhaena, SH	Perdata
5.	Verdian Martin, S.H.	Umum dan Keuangan
7.	Lina Safitri Tazili, S.H.	Hukum
8.	Tri Lestari, S.H., M.H.	Kepegawaian dan Ortala
9.	Ferri Irawan, S.H., M.H.	Minutasi, Upaya Hukum dan Delegasi
10.	Marselinus Ambarita, S.H., M.H.	PTIP
11.	Amir Rizki Apriadi, S.H., M.H.	Kimwasmat

Dengan surat keputusan ini diharapkan pengawasan pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dapat berjalan dengan baik sehingga hasil dari pengawasan dapat digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan bagi pimpinan pengadilan untuk menentukan kebijakan dan tindakan yang diperlukan menyangkut pelaksanaan tugas pengadilan.

A. INTERNAL

Pengawasan internal pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau dilaksanakan secara rutin baik secara langsung yakni dengan cara melakukan pemeriksaan langsung maupun secara tidak langsung dengan cara melakukan pengujian atau penilaian atas laporan atau isi dokumen. Objek dari pengawasan yang dilakukan meliputi :

1. Manajemen Peradilan
 - a. Program kerja;
 - b. Pelaksanaan/Pencapaian Target;
 - c. Pengawasan dan Pembinaan;
 - d. Kendala dan hambatan;
 - e. Faktor-faktor pendukung;
 - f. Evaluasi kegiatan.
2. Administrasi Perkara
 - a. Prosedur penerimaan perkara;
 - b. Prosedur penerimaan permohonan banding;
 - c. Prosedur penerimaan permohonan kasasi;
 - d. Prosedur penerimaan permohonan peninjauan kembali;
 - e. Prosedur penerimaan permohonan grasi;
 - f. Keuangan perkara;
 - g. Pemberkasan perkara dan kearsipan;
 - h. Pelaporan;

3. Administrasi Persidangan dan Pelaksanaan Putusan
 - a. Sistem pembagian perkara dan penentuan majelis hakim;
 - b. Ketepatan waktu pemeriksaan dan penyelesaian perkara;
 - c. Minutasi perkara;
 - d. Pelaksanaan putusan (Eksekusi).
4. Administrasi Umum
 - a. Kepegawaian;
 - b. Keuangan;
 - c. Inventaris;
 - d. Perpustakaan, tertib persuratan dan perkantoran.
5. Kinerja Pelayanan Publik
 - a. Pengelolaan manajemen;
 - b. Mekanisme pengawasan;
 - c. Kepemimpinan;
 - d. Pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia;
 - e. Pemeliharaan sarana dan prasarana;
 - f. Tingkat ketertiban, kedisiplinan, ketaatan, kebersihan dan kerapihan;
 - g. Kecepatan dan ketepatan penanganan perkara;
 - h. Tingkat pengaduan masyarakat.

Dari pengawasan yang dilakukan selama tahun 2022 terdapat berbagai temuan, lalu dilakukan klarifikasi oleh pimpinan objek pengawasan selanjutnya berbagai temuan tersebut dituangkan ke dalam laporan hasil pemeriksaan, untuk hal yang memerlukan adanya perbaikan maka Pimpinan objek pengawasan diminta untuk menandatangani kontrak kinerja bahwa ia bersedia untuk melakukan perbaikan dalam kurun waktu tertentu.

B. EVALUASI

Evaluasi terhadap pelaksanaan pengawasan dilakukan dilakukan setiap bulan oleh pimpinan pengadilan yakni Ketua Pengadilan dan Wakil Ketua Pengadilan melalui laporan pengawasan yang dilakukan oleh masing -masing hakim pengawas. Dari laporan pengawasan tersebut, pimpinan pengadilan dapat mengetahui kendala -kendala yang sedang dihadapi dalam melaksanakan tugas serta dapat menilai pelaksanaan pengawasan yang dilakukan oleh hakim pengawas. Dari evaluasi pengawasan ini nantinya dapat dirumuskan solusi dan kebijakan yang akan diambil guna menyelesaikan kendala dan hambatan yang ada.

BAB VII PENUTUP

A. KESIMPULAN

1. Pengadilan Negeri Lubuklinggau sebagai Pengadilan Tingkat Pertama telah berupaya secara maksimal untuk mewujudkan visi dan misi pengadilan yang telah ditetapkan dengan memanfaatkan sumber daya manusia dan sarana prasarana yang terbatas telah berusaha memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat para pencari keadilan.
2. Proses penyelenggaraan administrasi peradilan maupun administrasi umum telah berjalan sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP), walaupun masih terdapat berbagai kekurangan karena terbatasnya sumber daya manusia maupun sarana dan prasarana pendukung lainnya.
3. Seluruh kegiatan penyelenggaraan peradilan tidak terlepas dari pengawasan internal, Pembinaan dan Pengawasan yang dilakukan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, Wakil Ketua dan serta jajaran Hakim Pengawas pada Pengadilan Negeri Lubuklinggau.

B. REKOMENDASI

1. Untuk mengoptimalkan pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi penyelenggaraan peradilan, maka perlu secara bertahap diupayakan peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai guna menunjang kelancaran, kenyamanan dan kualitas kinerja.
2. Agar dilakukan pelatihan dan pembinaan secara berkelanjutan kepada seluruh pegawai baik teknis maupun non teknis agar dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat berjalan dengan baik dan mampu memberikan pelayanan yang terbaik.